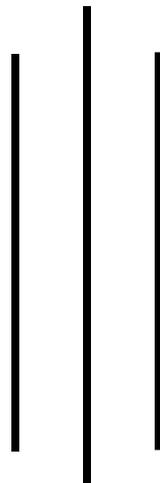




**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
(RPJP)
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2005 - 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2007**

- H. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
- I. WILAYAH DAN TATA RUANG
- J. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BAB III

VISI DAN MISI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 -2025

BAB IV

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 - 2025

BAB V

PENUTUP

2. RPJM Kabupaten Lombok Barat merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJP KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 - 2025

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.3. LANDASAN HUKUM
- 1.4. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
- 1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJP KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2005- 2025

BAB II

KONDISI UMUM

- A. SOSIAL BUDAYA DAN KEAGAMAAN
- B. EKONOMI
- C. PEMERINTAHAN DAERAH
- D. POLITIK
- E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
- F. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- G. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Kabupaten Lombok Barat yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan per-lima tahunan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJP Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 - 2025 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).

1.4. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJP Kabupaten Lombok Barat mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. RPJP Kabupaten Lombok Barat tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi Nusa Tenggara Barat.

mempersiapkan kerangka konseptual, dan d) mempersiapkan sumber daya manusia, material, dan finansial.

Langkah kedua, menghimpun berbagai data pendukung yang berasal dari dokumen-dokumen perencanaan strategis Kabupaten Lombok Barat, risalah dialog publik, hasil kajian, opini publik, RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2006-2009, hasil-hasil musrenbang beberapa tahun terakhir, dan hasil-hasil studi yang telah dilakukan di kabupaten/kota lain.

Langkah ketiga, membangun kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Lombok Barat dan pemerintah untuk menyusun RPJP Kabupaten Lombok Barat yang komprehensif, aspiratif, berwawasan masa depan, dan kontekstual dengan kondisi Kabupaten Lombok Barat.

Langkah keempat, menyelenggarakan musrenbang RPJP Kabupaten Lombok Barat tahun 2005-2025 yang melibatkan Pemerintah, DPRD Kabupaten Lombok Barat beserta Tim Ahli.

Langkah kelima, penetapan peraturan daerah tentang RPJP Kabupaten Lombok Barat tahun 2005-2025.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 - 2025 sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lombok Barat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama juga disusun dengan maksud sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 - 2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan Kabupaten Lombok Barat.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok terutama beras, dan memuncak menjelang peristiwa Gerakan 30 S/PKI.

Pada tahun 1969 - 1997, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, berhasil menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis melalui tahapan lima tahunan.

Tahapan – tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama dalam bidang pertanian khususnya swasembada beras tahun 1984.

Namun proses pembangunan pada masa tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir, kurang memperhatikan proses dan keberagaman daerah. Dampaknya adalah ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan yang menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang, terutama dalam kualitas pembangunan sosial budaya yang ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Barat.

Pada tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar rupiah dan perbankan yang berkembang menjadi krisis multidimensi. Sebagai akibatnya proses perencanaan pembangunan terhenti dan terfokus pada upaya pemulihan ekonomi.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan bersamaan dengan itu diterbitkan pula Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU – SPPN) dimana seluruh komponen Bangsa menyusun Perencanaan Pembangunan yang meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan Perundang - undangan mengenai Perencanaan Nasional dan Daerah, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah pertama, Persiapan awal dilakukan dengan a) mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, b) melakukan serangkaian konsultasi untuk menemukan inisiatif baru, c)

yang serba kompleks dan perlu ditangani secara khusus oleh Pemerintah Kota. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 dibentuklah kota Administratif Mataram yang membawahi tiga Kecamatan masing-masing Kecamatan Mataram, Ampenan dan Cakranegara.

Selain menetapkan Kota Administratif Mataram, PP No. 21 Tahun 1978 juga menetapkan tiga perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Narmada di Gunungsari, Perwakilan Kecamatan Kediri di Labuapi dan Perwakilan Kecamatan Gerung di Sekotong Tengah. Dengan demikian sejak 29 Agustus 1978 Wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 1 Kota Administratif, 9 Kecamatan dan 3 Perwakilan Kecamatan.

Kota Mataram sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Oleh karena itu sejak ditetapkan pembentukan Kotamadya Mataram sebagai Daerah Tingkat II maka wilayah Kabupaten Lombok Barat berkurang dari 12 Wilayah Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Bayan, Gangga, Tanjung, Gunungsari, Narmada, Labuapi, Kediri, Gerung dan Sekotong Tengah.

Selanjutnya pada tahun 2001 keempat Kecamatan Pembantu tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 wilayah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, maka wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dimekarkan menjadi 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Pemenang, Kayangan, Gungsari, Batulayar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah.

Ibukota Kabupaten Lombok Barat dipindahkan dari Kota Mataram ke Giri Menang Gerung dan sesuai dengan Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/3638/ PUOD tanggal 22 Desember 1999 dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 49/M.PAN/2/2000 tanggal 2 Pebruari 2000.

Berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dimulai pada era 10 (sepuluh) tahun pertama (1958 -1968), Kabupaten Lombok Barat seperti juga wilayah Kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Barat mengalami kesulitan diberbagai bidang terutama dibidang ekonomi. Dampaknya terjadi pada akhir tahun 1961 dimana kesulitan ekonomi masyarakat begitu mencekik

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : TAHUN 2007
TANGGAL : 2007
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005 - 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang pemerintahan daerah NIT Nomor 44 tahun 1950 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wilayah administratif Lombok Barat menjadi daerah bagian yang otonom. Seperti daerah Kedistrikan Ampenan Barat, Kedistrikan Ampenan Timur, Kedistrikan Tanjung, Kedistrikan Bayan, Kedistrikan Gerung, Asisten Kedistrikan Gondang dan Kepunggawaan Cakranegara. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957 dimana daerah Indonesia dibagi habis dalam daerah Swatantra Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957, lahirnya Undang-undang nomor 64 dan 69 tahun 1958 masing-masing tentang pembentukan daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT serta daerah Tingkat II didalam wilayah daerah Tingkat I yang bersangkutan diundangkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1958. Oleh karena itu secara yuridis daerah Swatantra Tingkat II Lombok Barat sudah terbentuk sejak tanggal 14 Agustus Tahun 1958.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Up. 7 / 14 / 34 diangkat Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tk. II Lombok Barat, yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959 yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat yang diperingati setiap tahun.

Kota Mataram sebagai Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat telah mengalami perkembangan yang demikian pesat, sehingga banyak menghadapi permasalahan

4. Tingginya intensitas terjadinya bencana alam di Kabupaten Lombok Barat, memberikan tantangan untuk di formulasikan penataan terpadu yang mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi bencana dalam perencanaan ruang wilayah dengan tetap mengacu pada aspek-aspek dasar perencanaan tata ruang.

J. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)

Tantangan utama kedepan adalah bagaimana upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan berdasarkan materi dan kebutuhan lokal masyarakat dengan tentunya hal ini tetap mengacu pada universalitas ilmu pengetahuan sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Hal ini juga akan bersinergi pada eksplorasi dan pengembangan teknologi yang sangat berwawasan komunitas dan tepat guna bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Usaha ini harus didukung oleh apresiasi dan penghargaan yang tinggi (Hak Atas Kekayaan Intelektual / HAKI) kepada para penemu ataupun inisiator lokal yang berhasil menciptakan teknologi-teknologi kreatif dan bermanfaat secara lokal maupun nasional.

2. Dalam rangka mengantisipasi maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, ke depan akan menghadapi tantangan meningkatnya informasi global di kalangan generasi muda yang berpotensi pada penggunaan napza dan obat-obatan terlarang lainnya.

I. WILAYAH DAN TATA RUANG

1. Akselerasi pembangunan ekonomi pada era otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan daya serap investasi daerah di Kabupaten Lombok Barat, menyebabkan terjadinya ekspansi aktivitas ekonomi yang cukup signifikan. Hal ini terutama terjadi pada ruang-ruang wilayah tempat terkonsentrasinya sumberdaya alam dan alokasi-alokasi sumberdaya ekonomi, kondisi ini sangat berpengaruh pada pola struktur ruang wilayah dan distribusi penggunaan lahan daerah. Oleh karena itu, tantangan ke depan tata ruang dan pengembangan wilayah di Kabupaten Lombok Barat adalah seoptimal mungkin meminimalisir terjadinya disparitas dan kesenjangan spasial sebagai dampak dari ekspansi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal daerah.
2. Distribusi alokasi fasilitas dan utilitas daerah sebagai upaya pemenuhan tingkat pelayanan pada daerah-daerah terpencil juga merupakan tantangan yang sangat berarti bagi penataan ruang di Kabupaten Lombok Barat. Kondisi pelayanan yang tidak merata dapat berpengaruh pada rendahnya kualitas pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun sangat berpengaruh pada melonjaknya kebutuhan akan perumahan dan infrastruktur lainnya. Secara kausalitas hal ini berdampak pada ekspansi penggunaan ruang untuk kebutuhan konservasi alam dan lahan pertanian yang dijadikan areal perumahan. Oleh karena itu penataan ruang sangat berperan penting dalam mengontrol dan mengendalikan konservasi lahan untuk kegiatan perumahan dan aktivitas lainnya yang bersifat sporadis untuk dapat memberikan kesinambungan dan berkelanjutan tata guna lahan pada masa yang akan datang.

utama terletak pada kemampuan untuk memberikan pelayanan jaringan telekomunikasi (dalam hal ini telepon dan internet) sampai ke pelosok desa.

Hal ini sangat penting mengingat efektivitas sarana telekomunikasi sebagai media untuk berintraksi yang sangat efisien, baik untuk kepentingan sosial, ekonomi maupun politik. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana air bersih, tantangan utama terletak pada kemampuan pemerintah dalam pengembangan sumberdaya air secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini mengingat bahwa kontinuitas penyediaan air bersih bukan hanya terletak pada pembangunan infrastruktur distribusi pelayanan saja, namun pemeliharaan terhadap keberlanjutan dan eksistensi ekologis sumber-sumber air bersih serta daerah tangkapan air juga sangat penting untuk dilakukan. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan pengembalian fungsi dan eksistensi hutan sebagai media penampungan air dalam prinsip hidrologis.

3. Selanjutnya untuk infrastruktur jalan dan prasarana umum, seperti pasar, perkantoran dan yang lainnya, tantangan utama bukan hanya terletak pada kemampuan penyediaan pelayanan yang menyentuh sampai ke pelosok desa, namun juga kemampuan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengingat indikator keberhasilan pembangunan terletak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan kuantitas dan kualitas pelayanan yang optimal. Selain itu juga pemeliharaan terhadap infrastruktur dan fasilitas umum ini sudah saatnya melibatkan peran serta masyarakat secara penuh sebagai upaya untuk memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi, namun tentunya harus diatur dalam skema yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kesan lepas tangan dari pemerintah daerah.

H. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Lombok Barat di dalam mengurangi angka kriminalitas di masyarakat adalah meningkatnya angka pengangguran terbuka yang terjadi apabila kondisi perekonomian daerah mengalami stagnasi atau bahkan memburuk di dalam kurun waktu 20 tahun, selain itu juga dihadapkan pada globalisasi yang melahirkan budaya konsumtif dan berpotensi untuk memotivasi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

terpadu antar dinas terkait guna meminimalisir degradasi lingkungan akibat tumpang tindihnya pengelolaan SDA.

4. Krisis energi yang menimpa Indonesia pada umumnya, yang kemudian juga dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Lombok Barat memberikan gambaran akan kurangnya penelitian dan pengembangan terhadap potensi energi alternatif yang tersedia pada sumberdaya alam wilayah. Tantangan utama ke depan adalah pengeksplorasian energi alternatif yang berbasis pada sumberdaya alam yang ada dengan tetap mengacu pada prinsip keberlanjutan.
5. Dari perspektif lingkungan hidup, akumulasi aktivitas pembangunan fisik dan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat, menyebabkan terjadinya peningkatan kuantitas maupun kualitas pencemaran dan degradasi lingkungan yang sangat signifikan. Hal ini perlu diantisipasi dengan peningkatan kesadaran segenap pemangku kepentingan dan keterlibatan yang berarti dari Pemerintah Daerah.

G. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Invasi modal dan investasi asing dalam era globalisasi ini sangat tergantung pada kesiapan pemerintah dan masyarakat menghadapinya. Pengembangan dan pengelolaan kawasan andalan sangat bergantung pada aspek kontinuitas dan keberlanjutan pilar-pilar produksi dan pemasaran yang telah disiapkan. Aspek kontinuitas terkait bukan hanya pada proses produksi saja tetapi juga pada keberlangsungan pengelolaan pasca produksi seperti pemasaran dan pengontrolan terhadap kualitas hasil produksi. Sedangkan aspek keberlanjutan ditekankan pada ketersediaan bahan baku dan materi penunjang produksi untuk dapat menjamin hasil produksi secara terus menerus dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.
2. Pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan yang terus meningkat mengakibatkan tingginya kebutuhan pada sektor energi, sarana dan prasarana publik, utilitas lainnya. Pada sektor energi, komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengembangan pada energi alternatif masih terkendala pada aspek pendanaan dan partisipasi masyarakat. Kebijakan ini hendaknya harus dimulai pada skala wilayah tertentu untuk dijadikan sebagai pioner dan uji coba implementasinya. Kemudian pada sarana prasarana komunikasi, tantangan

mewujudkan peran pendidikan untuk memperbaiki akhlaq, kemampuan hidup dan pemahaman multikultural.

3. Seiring dengan makin tingginya minat masyarakat untuk bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan sistem perlindungan bagi TKW/TKI di luar negeri serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem pengerahan tenaga kerja ke luar negeri termasuk asuransi dan sebagainya.

F. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

1. Intensitas pengelolaan sumberdaya alam yang terus menerus tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan mengakibatkan terjadinya penurunan yang signifikan terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya alam tersebut. Pada sektor kehutanan, eksploitasi besar-besaran sehingga menyebabkan banyaknya peralihan fungsi sumberdaya hutan merupakan contoh yang buruk terhadap pengelolaan sumberdaya alam secara umumnya. Dampak dari kegiatan eksploitasi hutan ini memberikan pengaruh besar pada beberapa aspek yang terkait seperti terganggunya ekosistem wilayah, penurunan debit air, dan rusaknya kualitas keanekaragaman hayati di daerah ini. Hal yang sama juga terjadi pada ekspansi kegiatan-kegiatan ekonomi yang bergantung pada sumberdaya alam lainnya seperti kelautan dan perikanan, pertanian dan yang lainnya. Oleh karena itu, tantangan utama adalah terciptanya pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, arif, partisipatif dan transparan untuk menjamin keberlangsungan dan ketersediaan sumberdaya alam, baik yang bersifat diperbaharui maupun tak diperbaharui.
2. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat cukup signifikan luasnya, namun pemanfaatan potensi kelautan ini masih belum optimal. Tantangan ke depan adalah dibutuhkannya sistem pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan yang komprehensif-terpadu dan berkelanjutan guna mengoptimalkan potensi tersebut untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat.
3. Terkotak-kotaknya pengelolaan sumberdaya alam pada dinas/instansi yang berbeda-beda sering menyebabkan terjadinya kelambanan dalam penyelesaian degradasi SDA. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sumberdaya alam yang

2. Tantangan yang lain adalah bagaimana mempercepat tumbuhnya civil society di Kabupaten Lombok Barat guna melaksanakan fungsi check and balance serta berpartisipasi aktif dalam penentuan kebijakan publik.

Untuk itu ke depan harus dikembangkan akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi, serta akses terhadap nilai-nilai demokrasi yang beretika, toleran dan menghargai hak orang lain.

3. Dalam rangka memantapkan politik lokal, tantangan ke depan harus mampu menyelenggarakan pilkada maupun pilkades yang jujur, aman dan demokratis. Untuk itu diperlukan kinerja yang lebih baik dari institusi-institusi yang terkait dengan proses pemilihan kepala daerah.

E. SUMBERDAYA MANUSIA

1. Dalam 20 tahun mendatang, Lombok Barat akan menghadapi jumlah penduduk yang cukup besar. Dengan pertumbuhan 2,18% per tahun maka jumlah penduduk tahun 2026 diperkirakan sebesar 1,3 juta orang. Jumlah tersebut sesungguhnya tidak menjadi masalah apabila parameter/indikator pendidikan dan kesehatannya membaik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kebijakan pemerintah mampu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, termasuk keberpihakan anggarannya untuk kepentingan tersebut.
2. Rendahnya kualitas SDM Lombok Barat yang diukur dengan IPM mengakibatkan rendahnya produktifitas dan daya saing lokal. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Di bidang kesehatan tantangan yang dihadapi adalah menurunkan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta menurunkan proporsi balita kurang gizi, sekaligus mencegah timbulnya kasus gizi buruk yang mungkin terjadi karena faktor ekonomi masyarakat. Sementara itu, tantangan di bidang pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan termasuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan seiring dengan pertumbuhan penduduk untuk berbagai jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah menuntaskan penduduk yang masih buta aksara. Tantangan lain adalah

sebagai daerah tujuan wisata yang indah dan aman. Selain itu adalah memberikan nilai tambah produk pariwisata Lombok Barat agar lebih mampu bersaing dengan daerah lainnya.

5. Di dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, tantangan ke depan adalah mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar kaum miskin secara bertahap, terkoordinasikan dengan baik dan berkesinambungan.

C. PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pemerintah Daerah ke depan dihadapkan pada globalisasi yang sarat akan kompetisi dan liberalisme perdagangan. Untuk itu perubahan cara fikir (mindset) dan perilaku birokrasi merupakan tantangan yang cukup berat. Sistem yang ada dan dijalankan selama ini harus dirubah ke arah yang lebih kompetitif, berorientasi pelanggan dan mampu bersaing dengan lembaga swasta maupun LSM.
2. Organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ke depan merupakan organisasi yang miskin struktur namun kaya fungsi, dalam artian instansi pemerintah tidak lagi dipenuhi oleh pejabat struktural yang akan menghabiskan banyak dana tetapi lebih ke arah fungsionalisasi dan spesialisasi yang berorientasi kinerja.
3. Dalam hal pengembangan aparatur untuk 20 tahun ke depan adalah mewujudkan kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan yang proporsional. Untuk penyediaan SDM tersebut diperlukan kerjasama berbagai pihak terutama lembaga pendidikan tinggi ataupun pendidikan kejuruan.

D. POLITIK

1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dalam pembangunan bidang politik adalah mempertahankan kerukunan antar agama, antar etnis maupun antar golongan di masyarakat. Hal itu dapat diwujudkan melalui azas keadilan dan kesetaraan. Selain daripada itu, kerukunan ataupun keharmonisan antar pemeluk agama, antar etnis maupun antar golongan dapat dipertahankan melalui komunikasi/silaturahmi yang baik dan kontinyu.

kehidupan sehari-hari dan tetap mempertahankan kerukunan antar umat beragama.

3. Dalam hal pemberdayaan perempuan, tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Selain dari pada itu juga bagaimana menekan kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran anak.
4. Tantangan lain yang dihadapi adalah menjadikan kesenian Lombok Barat sebagai salah satu aset budaya yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

B. EKONOMI

1. Tantangan Lombok Barat dalam membangun perekonomian ke depan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan ketertinggalan dari daerah lain.
2. Secara eksternal tantangan itu dihadapkan pada situasi perekonomian Nasional yang sampai kini belum sepenuhnya pulih, serta perekonomian regional NTB yang juga masih bergelut dengan masalah kemiskinan. Secara internal tantangan tersebut dihadapkan kesiapan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah untuk bersaing dengan daerah lain dalam meningkatkan investasi di daerah.
Selain daripada itu, 20 tahun ke depan juga dihadapkan tantangan ketenagakerjaan, dimana angkatan kerja didominasi lulusan SD dan SMP, untuk itu dalam rangka menyediakan lapangan kerja, pemerintah daerah ditantang untuk memacu sektor industri maupun sektor jasa.
3. Pembangunan pertanian Lombok Barat ke depan akan menghadapi tantangan semakin menurunnya nilai tukar petani (NTP) yaitu perbandingan antara 1 satuan nilai produk pertanian dibandingkan dengan 1 satuan produk lainnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa ke depan orang akan lebih mempertimbangkan untuk bertahan hidup di sektor pertanian atau mencari nafkah dari sektor lain, termasuk mengalihfungsikan lahan pertanian yang dimilikinya.
4. Di bidang kepariwisataan tantangan yang dihadapi Lombok Barat ke depan adalah mengembalikan dan mempertahankan citra tentang Lombok Barat

4. Munculnya fenomena desa-kota pada daerah-daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Mataram.

Kondisi ini menimbulkan terjadinya stagnasi pengembangan ruang pada zona-zona tersebut, baik secara spasial maupun a-spasial seperti sosial-ekonomi masyarakat yang ada di daerah tersebut.

J. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)

1. Kondisi pengembangan ilmu pengetahuan di Kabupaten Lombok Barat masih dalam taraf normatif dan formal pada lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dari masih lemahnya inisiatif, inovasi dan kreatifitas dari masyarakat dan pemerintah untuk lebih meningkatkan tingkat kegunaan ilmu pengetahuan, terutama dalam tataran praktis.

Oleh karena itu dibutuhkan stimulasi dari lembaga-lembaga penelitian formal baik tingkat lokal maupun nasional untuk dapat menggali dan meningkatkan kebermanfaatan ilmu pengetahuan pada materi lokal yang tersedia untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Barat.

2. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi di Kabupaten Lombok Barat masih belum optimal. Hal ini masih minimnya penguasaan dan kesadaran untuk menggunakan teknologi tersebut.

TANTANGAN

A. SOSIAL BUDAYA DAN KEAGAMAAN

1. Tantangan bagi pelestarian budaya lokal kedepan adalah derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk itu kedepan diperlukan motivasi yang tinggi, daya saing dan penyerapan nilai-nilai global.
2. Membangun manusia Lombok Barat sepenuhnya tak terlepas dari membangun moral dalam artian keimanan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan ajaran agama dalam

3. Sebagai salah satu Kabupaten yang berada pada zona gempa dan tsunami, Kabupaten Lombok Barat dihadapkan pada kondisi siap tanggap darurat. Selama ini sering dilakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika untuk melakukan sosialisasi tentang kemungkinan gempa dan tsunami, selain itu juga disiapkan tim siaga bencana alam oleh Pemerintah Daerah, namun langkah ini belum sepenuhnya optimal dan membutuhkan peningkatan dalam hal sarana dan prasarana, kesiapan SDM dan dana yang memadai.

I. WILAYAH DAN TATA RUANG

1. Secara birokrasi kondisi implementasi rencana tata ruang di Kabupaten Lombok Barat terletak pada minimnya intensitas penggunaan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang dalam penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan sendiri, sebagai dampak dari kurangnya pemahaman akan pentingnya rencana tata ruang sebagai payung (*document regulator/policy umbrella*) kebijakan untuk perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat pada kurang terintegrasinya perencanaan tata ruang ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek , menengah, maupun panjang.
2. Alokasi ruang untuk fasilitas dan utilitas wilayah belum terdistribusi secara merata, sehingga trend arah pengembangan spatial lebih teraglomerasi pada pusat-pusat eksisting. Hal ini menyebabkan pola dan struktur ruang yang sudah diformulasikan dalam dokumen-dokumen perencanaan tata ruang menjadi bias dan terkesan tidak terarah. Implikasi dari pola ruang yang tidak teratur berdampak pada kelancaran sistem transportasi terutama pada zona-zona ruang untuk fasilitas publik.
3. Inkonsistensi pengembangan tata ruang wilayah pada setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) menyebabkan ketidakseimbangan perkembangan kota-kota di bagian utara-tengah-selatan. Kondisi ini disebabkan juga oleh belum jelasnya fungsi setiap kota kecamatan atau bahkan fungsi kota kabupaten, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi dan skala pelayanan antar kota pada periode yang berbeda.

proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melalui / mempertimbangkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat, proses dialog baik secara vertikal dan horizontal, keberlanjutan dan kelayakan anggaran. Untuk itu, pihak yang akan terpengaruh langsung oleh perencanaan pembangunan daerah berhak memberikan *share* dalam keputusan – keputusan yang diterbitkan. Sejauh ini, perencanaan partisipatif telah dilaksanakan dalam wujud Musrenbang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten kemudian hasilnya dipadukan dengan Musrenbang tingkat Provinsi dan Nasional. Namun demikian, efektifitas dari proses perencanaan tersebut belum optimal dalam artian kebutuhan masyarakat yang terjaring dalam Musrenbang dan Rencana Kerja Dinas / Instansi terkait masih banyak berbeda. Untuk itu tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat diharapkan dapat menjadi modal bagi meningkatnya perencanaan yang partisipatif.

H. KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Kondisi kamtibmas atau gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi kejahatan, upaya perusakan lingkungan dan aktualisasi konflik antar kelompok masyarakat yang terkait dengan SARA. Berbagai gangguan keamanan di wilayah Lombok Barat tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan. Sejauh ini beberapa konflik sosial yang terjadi adalah terkait dengan dugaan penyimpangan ajaran agama. Untuk kriminalitas murni, kasus yang banyak terjadi di wilayah Lombok Barat pada kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pencurian ternak, curas dan perampokan.
2. Salah satu hal yang perlu diwaspadai di Kabupaten Lombok Barat beberapa tahun terakhir ini adalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Penyalahgunaan narkoba yang selama ini erat kaitannya dengan daerah wisata dikhawatirkan meluas ke masyarakat biasa dan bahkan ke lingkungan pelajar/sekolah. Hal ini sangat memerlukan dukungan berbagai pihak untuk mengatasinya.

Hingga tahun 2004 terdapat 78 buah perusahaan yang mendapat ijin usaha industri, 303 perusahaan menengah dan perusahaan kecil.

Pengembangan keterlibatan swasta tetap menjadi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sejauh ini pengembangan peran swasta ini mampu menyerap sedikitnya 7,89 % angkatan kerja di Kabupaten Lombok Barat. Ke depan pengembangan ini dilakukan dengan pembentukan kelembagaan dan kebijakan yang menarik investasi swasta dalam bidang infrastruktur, mengubah hukum dan peraturan, mengenakan konsep pemberian harga yang merefleksikan biaya (*cost – reflective pricing*), pengelolaan lingkungan sumber daya dan menyediakan prosedur dan proses privatisasi yang transparan.

Reformasi semacam ini juga berkontribusi dalam meningkatkan keakuntabilisan sektor publik dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai contoh, dengan menciptakan kompetisi yang transparan diantara pihak swasta untuk menyediakan layanan publik, diharapkan dapat membantu mengatasi aspek korupsi yang mungkin terjadi. Secara umum, partisipasi swasta yang efisien dapat membebaskan sumber daya umum untuk program – program prioritas.

Dalam mengatur sumber daya substansial dari sektor swasta, membutuhkan pembentukan kelembagaan dan peraturan lingkungan yang menarik investasi swasta dalam bidang infrastruktur, membuat peraturan daerah dan menyediakan prosedur dan proses privatisasi dan / atau disinvestasi yang transparan. Selain itu, partisipasi swasta yang baik dapat tercapai dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta serta antar daerah yang didukung melalui beberapa proyek seperti KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal). Dengan adanya partisipasi swasta yang efisien, diharapkan dapat mengoptimalkan APBD guna membiayai program – program strategis dan menanggulangi kemiskinan.

Ad.3. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, yang pada intinya adalah bahwa dalam

memprihatinkan. Disamping umur kendaraan yang cukup tua, juga tidak didukung dengan perawatan yang memadai.

Kondisi yang sama juga terjadi dibidang transportasi laut yang melayani penyeberangan ke Padang Bai (Bali), dimana sebagian kapal ferri berusia lebih dari 20 tahun.

- e. Pasar merupakan salah satu infrastruktur perekonomian yang strategis di Kabupaten Lombok Barat. Pasar – pasar yang tersebar di tiap – tiap Kecamatan adalah tempat dimana hasil bumi wilayah Lombok Barat maupun dari daerah lain diperdagangkan, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Lombok Barat. Saat ini jumlah pasar di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 34 unit; 2 unit terdapat di Bayan, 3 di Kayangan, 1 di Gangga, 1 di Tanjung, 1 di Pemenang, 3 di Gunungsari, 1 di Lingsar, 2 di Narmada, 1 di Kuripan, 2 di Kediri, 2 di Labuapi, 3 di Gerung, 2 di Lembar dan 3 di Sekotong.
- f. Salah satu upaya yang telah dilakukan selama ini adalah perluasan kapasitas infrastruktur perkotaan Gerung sebagai pusat pemerintahan dengan menitik beratkan pembangunan perkantoran, pemukiman dan sarana perkotaan lainnya. Selain itu pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada infrastruktur dasar di Desa tertinggal, infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan atau melayani antar Kecamatan dan Desa. Namun demikian hasil yang diharapkan dirasakan masih jauh karena terbatasnya dana pemerintah daerah.
- g. Pembangunan dibidang penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Lombok Barat selama ini dititik beratkan pada upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi dasar yang berkualitas, efisien, dengan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas air permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum.

Ad.2. Keterlibatan Swasta

kegiatan / kejadian diseluruh belahan dunia dapat segera diinformasikan ke wilayah lainnya melalui berbagai media cetak maupun elektronik (termasuk internet) begitu pula halnya dengan Kabupaten Lombok Barat. Namun demikian, ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi menjadi masalah dan kendala, khususnya bagi penduduk pedesaan. Hanya 11 % rumah tangga yang memiliki telepon rumah, sedangkan pengguna internet masih dibawah 1 %.

- c. Sarana air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh semua warga masyarakat. Oleh karena itu ketersediannya dalam jumlah yang memadai disetiap wilayah merupakan suatu hal yang sangat vital. Di Kabupaten Lombok Barat, cakupan penyediaan dan pelayanan air bersih sudah sampai ke seluruh wilayah. Sampai dengan tahun 2004, persentase rumah tangga menurut sumber air minumnya adalah sebagai berikut : leding 6,41 %; pompa 2,66 %; sumur 82,76 %; mata air 7,18 %; air sungai 0,16 % dan lainnya 0,18 %. Adapun jumlah rumah tangga pelanggan air minum sampai dengan tahun 2004 adalah sebanyak 11.687.991 rumah tangga.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana jalan sangat diperlukan guna memperlancar arus distribusi barang (sarana produksi dan hasil produksi) serta mobilitas penduduk sehingga dapat mendukung pergerakan roda perekonomian masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang cukup kondusif, jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang sangat signifikan adalah jumlah sepeda motor yakni sekitar 11 % per tahun. Namun demikian, pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut tidak diikuti dengan kapasitas jalan. Hampir sepertiga jalan di Kabupaten Lombok Barat dalam kondisi rusak (tidak mantap), sedangkan sisanya (15,52 %) dalam kondisi sedang dan hanya 13,55 % dalam kondisi baik, hal ini dikarenakan kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Selain jalan, sarana transportasi yang layak diperhatikan adalah sarana angkutan umum, baik darat maupun laut. Hampir 60 persen kondisi angkutan umum yang melayani rute antar Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat

G. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Salah satu komponen strategis yang terkait dengan pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah : (1) ketersediaan sarana prasarana publik; (2) keterlibatan swasta dalam pembangunan secara proporsional; (3) terdapat sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

Ad.1 . Sarana dan Prasarana Publik

- a. Energi listrik merupakan sumber tenaga baik untuk penerangan maupun keperluan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh segenap lapisan masyarakat. Bahkan untuk kelompok masyarakat tertentu serta untuk berbagai aktivitas dan keperluan seperti penerangan, memasak dan aktivitas – aktivitas lainnya sangat tergantung pada energi listrik sehingga keberadaannya mutlak diperlukan. Kebutuhan energi listrik, khusus untuk Lombok Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2000 sebesar 80.485 KWh menjadi 81.825 KWh pada tahun 2001, 111.861 KWh pada tahun 2002 dan 118.671 KWh pada tahun 2003. Namun demikian, kemampuan PLN untuk menyediakan energi listrik hanya mampu sekitar 72 %, sehingga sulit bagi penduduk yang mengajukan permintaan layanan sambungan listrik. Terkait dengan isu energi, Kabupaten Lombok Barat telah berkomitmen ke depan untuk : (1) mengembangkan alternatif energi terbarukan seperti pemanfaatan panas bumi, energi surya, energi air, energi angin dan energi gelombang samudera; (2) membuat kebijakan yang mendukung penghematan energi dalam bidang transportasi, perindustrian, rumah tangga dan komersial. Akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan anggaran dan lemahnya dukungan iptek.
- b. Keberadaan prasarana dan sarana telekomunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting guna melancarkan arus komunikasi antar daerah sehingga dapat menunjukkan kegiatan pembangunan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat menyebabkan

pertumbuhan perumahan baik di wilayah Lombok Barat maupun Kota Mataram menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Untuk itu perlu untuk disikapi secara serius.

3. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah terdiri dari wilayah darat seluas 1.672,15 km² dan perairan seluas 1.352,49 km² yang dikelilingi garis pantai sepanjang 182,17 km serta pulau – pulau kecil (gili dan taket) sebanyak 88 buah, yang terbentang dari utara ke selatan dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Samudera Indonesia, sebelah timur Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, dan sebelah barat Selat Lombok dan Kota Mataram yang terbagi didalam 15 (lima belas) Kecamatan.
4. Salah satu kekayaan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat adalah pulau – pulau kecil, yaitu pulau – pulau yang berada diperairan laut maupun yang berada diperairan darat baik yang berpenduduk maupun yang tidak berpenduduk yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah pulau – pulau kecil di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 88 buah, dimana hanya 11 buah pulau yang berpenghuni. Diantara 88 buah pulau – pulau kecil yang merupakan gili sebanyak 15 buah dan taket sebanyak 73 buah.
5. Salah satu faktor yang harus dicermati didalam penggunaan lahan adalah kemampuan tanah. Tingkat kemiringan tanah di Kabupaten Lombok Barat sangat bervariasi dan diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Luas masing – masing Kecamatan Kabupaten Lombok Barat berdasarkan luas / kemiringan tanah pada tahun 2004 yaitu bahwa kemiringan tanah 0 – 2 % berada disebagian Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yaitu Kecamatan Bayan; Kayangan; Gangga; Batulayar; Narmada; Lingsar dan Kuripan. Sedangkan kemiringan di atas 2 % berada disebagian Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. Dari jenis tanah yang ada, maka jenis tanah di Kabupaten Lombok Barat sebagian besar sangat peka terhadap erosi yaitu : 10.307 ha atau 61.079 % dari luas Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan kurang peka 61.079 ha atau 36,53 % dan tidak peka seluas 2.490 ha atau 1,49 %. Namun disisi lain pembangunan jalan, infrastruktur lain maupun pertanian sering mengabaikan hal tersebut, sehingga seringkali terjadi erosi / longsor yang tentunya berpotensi membahayakan penduduk.

persentase penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor riil. Namun demikian hal tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja baik yang formal maupun non formal.

Salah satu alternatif yang selama ini ditempuh oleh masyarakat adalah berusaha menjadi tenaga kerja di luar negeri (TKI / Nakerwan). Hingga akhir tahun 2005 jumlah tenaga kerja asal Lombok Barat yang bekerja di luar negeri sebanyak 1.688 orang, namun harus diakui bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menemui banyak masalah seperti kasus tenaga kerja illegal ataupun tindak kekerasan terhadap tenaga kerja wanita oleh majikan.

F. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penerapan prinsip – prinsip yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan kedalam kebijakan dan peraturan daerah. Prinsip – prinsip tersebut saling sinergis dan melengkapi dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada asas partisipasi, tranparansi dan akuntabilitas yang mendorong upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Lombok Barat masih dirasakan belum optimal, tingkat perusakan alam seperti penambangan liar bahan galian golongan C seperti pasir dan batu apung, terumbu karang, pembalakan kayu dan penebangan liar masih banyak dilakukan masyarakat.
2. Luas kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2004 adalah 82.197,60 ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 28.274,5 ha; Hutan Produksi biasa seluas 12.982 ha; Hutan Wisata seluas 3.043,7 ha; Hutan Taman Wisata seluas 12.164,4 ha; Taman Hutan Raya seluas 3.155 ha dan Hutan Tanaman Laut seluas 2.954 ha. Dikarenakan terjadinya perambahan hutan, penebangan liar dan alih fungsi hutan, maka dari waktu ke waktu angka ini terus berkembang. Salah satu dampak langsung dari pengrusakan hutan adalah berkurangnya sumber mata air atau menurunnya debit sumber air. Sementara disisi lain,

daya manusia dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan pengembangan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas melalui pengembangan investasi sosial dibidang pendidikan, pemberdayaan dan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2005 Kabupaten Lombok Barat yang berpenduduk sekitar 743.484 jiwa, terdiri atas 47,05 % laki – laki dan 52,95 % perempuan. Dari jumlah tersebut 76 % diantaranya adalah penduduk usia kerja (usia 15 – 64 tahun), maka dari segi jumlah usia produktif, sumber daya manusia Kabupaten Lombok Barat cukup memiliki peluang untuk lebih berkembang, namun demikian IPM Lombok Barat masih menempati peringkat ke – 7 di Provinsi NTB.

2. Menurut hasil penyusunan IPM Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2004 mencapai indeks 64,71. Kondisi ini lebih baik daripada tahun 2001 yang hanya mendapatkan indeks 57,64. Secara rinci nilai indeks tersebut merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup sebesar 61,64 tahun, Angka Melek Huruf Aksara penduduk usia 15 – 44 tahun sebesar 70,80 persen, Rata – rata Lama Sekolah 5,86 tahun dan Pendapatan Rata – rata Masyarakat yang dihitung berdasarkan Paritas Daya Beli sebesar 697.454 rupiah.
3. Derajat kesehatan masyarakat Lombok Barat sejauh ini telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Balita dan meningkatnya Usia Harapan Hidup. Namun demikian, hingga saat ini Kabupaten Lombok Barat masih dihadapkan dengan masalah kurang gizi pada balita dan masih banyaknya pertolongan melahirkan melalui non medis (dukun).
4. Derajat pendidikan penduduk Lombok Barat mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatnya Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMP / MTS dan meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah untuk semua kelompok usia, namun perlu diakui bahwa masih banyak penduduk miskin yang belum mampu menamatkan SD / MI dan bahkan masih buta aksara.
5. Sejauh ini tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan angka 62,09 %. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah

menyatukan kepentingan, perhatian dan kebutuhan masyarakat atau bagian - bagiannya, dan untuk menyampaikannya kepada para pemegang kekuasaan atau wakil – wakil partai politik; (2) membantu pemantauan dan pengendalian lembaga – lembaga publik serta pelaksanaan Undang – Undang dan peraturan – peraturan;

dan (3) memediasi antar kepentingan – kepentingan sosial, agama dan budaya yang bertentangan, merekonsiliasi konflik dan menemukan resolusi – resolusi konflik yang konstruktif dan berkelanjutan. Masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat merupakan kekuatan utama dalam upaya menciptakan mekanisme *chek and balance*, terwujudnya *good goverment*, distribusi kekuasaan yang sehat dan fair, akuntabilitas pemerintahan, tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta struktur dan budaya politik yang demokrasi, adil dan berorientasi kepada masyarakat luas. Namun demikian hingga saat ini tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil masih terkendala oleh belum berkembangnya sistem informasi dan komunikasi, belum berdayanya masyarakat terutama yang tinggal di wilayah – wilayah yang terpencil dan hidup di bawah standar kemiskinan, selain itu juga belum mampu diaskesnya nilai – nilai keterbukaan, kebebasan dan pemerataan dalam lingkup global.

3. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan yang telah dicapai adalah telah dilaksanakannya Pemilu langsung anggota DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara aman, jujur dan demokratis pada tahun 2004 yang lalu.
4. Guna memenuhi aspirasi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Lombok Barat, telah dibentuk Kantor Perwakilan Lombok Barat bagian Utara di Kecamatan Kayangan dan telah digalangnya persiapan – persiapan pemekaran daerah Kabupaten dengan bekerjasama dengan para tokoh masyarakat, sejumlah LSM dan DPRD.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan langkah penting mengingat SDM merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan sumber

4. Implikasi dari perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Lombok Barat adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik, murah, mudah dan cepat.

Selain tuntutan akan layanan publik, permasalahan sosial dan pembangunan yang kompleks juga kerap muncul. Dalam perkembangannya kondisi ini akan menjadi masalah administratif tersendiri bagi pemerintah daerah. Selain harus menyediakan berbagai layanan publik dengan kualitas prima, maka pemerintah daerah memerlukan suatu sistem yang mampu membantu penyelesaian berbagai tugas-tugas pemerintahan secara lebih cepat dan lebih baik dengan melakukan transparansi, kepastian dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Dengan memiliki berbagai kebutuhan di atas, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai berbenah dengan menyiapkan sistem layanan *online*. Namun, hal ini baru sebatas membangun *website* atau membuka saluran informasi melalui *email*. Selain itu, pengembangan e-goverment ini juga diarahkan pada pengelolaan keuangan dan kepegawaian daerah. Namun demikian, implementasi e-goverment ini belum sepenuhnya optimal mewujudkan transparansi dan efisiensi pemerintahan karena belum diaplikasikan ke berbagai bidang kewenangan ataupun aspek pelayanan publik dan baru dipandang sebagai tugas KPDSI saja.

D. POLITIK

1. Situasi politik di Kabupaten Lombok Barat merupakan resonansi dari konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia menempuh jalur transisi demokrasi, kegiatan masyarakat sipil semakin meningkat. Iklim baru reformasi politik, telah mendorong bertumbuhnya organisasi kemasyarakatan baru, yayasan – yayasan, perkumpulan – perkumpulan warga, serikat – serikat dan Ornop. Pada akhir tahun 2004 tercatat ada sekitar 42 lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 17 organisasi kemasyarakatan yang berkembang di Lombok Barat.
2. Pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) di Kabupaten Lombok Barat merupakan komponen strategis dalam rangka (1) memobilisasi dan

C. PEMERINTAHAN DAERAH

1. Model birokrasi yang panjang (*red-tape bureaucracy*) merupakan sebuah kondisi yang saat ini dihadapi dalam roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melakukan pembentukan organisasi yang diatur dengan Perda Nomor 16, 17 dan 18 Tahun 2000 yang berlaku hingga sekarang. Dalam hal ini, reformasi birokrasi Kabupaten Lombok Barat mutlak dilakukan secara sistematis dan terpadu, dengan disertai oleh standarisasi sistem prosedur dan koordinasi antar instansi untuk pelayanan publik.
2. Untuk melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki 9.083 PNS pada tahun 2005. Dari jumlah tersebut sebanyak 5.175 orang merupakan PNS Guru dan 3.908 orang merupakan PNS Non Guru. Jumlah ideal untuk tenaga guru sesungguhnya adalah 8.600 orang, jadi masih diperlukan sekitar 3.500 orang tenaga guru PNS. Selain itu, Kabupaten Lombok Barat juga dihadapkan pada kurangnya tenaga kesehatan yang mencakup dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan bidan desa.
3. Otonomi daerah merupakan peluang bagi terjadinya perubahan perilaku aparatur pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menjadi lebih efisien dan profesional. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat seharusnya telah melakukan perekayasa ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal tersebut karena pada saat ini dan dimasa yang akan datang pemerintah (pusat dan daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun internal masyarakatnya. Dari sisi eksternal, pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja dan budaya. Disisi internal, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan.

4. Sejauh ini perekonomian Kabupaten Lombok Barat mengandalkan sektor pertanian sebagai penampung tenaga kerja dan mata pencaharian masyarakat. Sekitar 67 % dari penduduk miskin hidup dari sektor pertanian dengan status buruh tani ataupun petani gurem. Masyarakat miskin yang mendominasi sektor pertanian tersebut masih dihadapkan pada masalah rendahnya kualitas SDM, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat dan ketidakberdayaan dalam mekanisme pasar.

5. Salah satu sektor yang diandalkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah adalah sektor pariwisata. Keindahan alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat merupakan potensi untuk mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hingga saat ini Kabupaten Lombok Barat memiliki 19 objek wisata alam dan 13 objek wisata sejarah / budaya. Akan tetapi sektor ini sangat rentan dengan isu keamanan, terorisme dan kondusifitas politik tanah air. Berbagai kejadian seperti kerusuhan 171 tahun 2000, bom bali I dan II serta isu SARA dan flu burung telah menurunkan citra pariwisata Lombok secara signifikan. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat dan mengakibatkan banyaknya usaha baik formal dan informal dibidang kepariwisataan yang gulung tikar.

6. Meskipun kondisi perekonomian Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan yang cukup baik, tetapi ada fakta lain yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dari tahun ke tahun meningkat. Untuk tahun 2004 misalnya, tingkat kesempatan kerja dibidang pertanian hanya 42,61persen sedangkan kesempatan kerja disektor listrik dan konstruksi hanya sekitar 5 %. Sektor keuangan merupakan sektor dengan kesempatan kerja terendah yakni kurang dari 0,5 %. Sektor jasa dan sektor industri selama 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan negatif, artinya tidak ada penambahan kesempatan kerja secara absolut dan relatif pada kedua sektor tersebut.

pertumbuhan ekonomi global pasca serangan WTC dan diperparah dengan kasus bom Bali, kondisi ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2003. Pada tahun 2004 laju pertumbuhan PDRB Lombok Barat mengalami peningkatan sebesar 5,58 %. Peningkatan ini disebabkan oleh membaiknya harga dasar gabah petani, berkembangnya sektor industri dan pengolahan, sektor bangunan dan sektor jasa. Kemudian pada tahun 2005 PDRB Lombok Barat adalah sebesar Rp. 1.881.424,65,- Atas Dasar Harga Konstan 2000.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan rata – rata 7,12 % per tahun. PAD tahun 2004 adalah sebesar 23,048 milyar atau 7,63 persen dari total pendapatan daerah sebesar 301,9 milyar lebih. Pada tahun 2005 PAD Lombok Barat adalah sebesar 26,9 milyar lebih atau 8,12 persen dari total pendapatan daerah sebesar 331,12 milyar lebih. Dana perimbangan pada tahun 2004 adalah sebesar 87,78 % dari total pendapatan daerah dan tahun 2005 adalah 88,47 %. Dari sisi belanja untuk tahun 2005 dialokasikan 53,09 % untuk belanja aparatur dan 46,10 untuk belanja publik.
3. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh kebawah garis kemiskinan. Kriteria penduduk miskin yang digunakan dalam hal ini adalah seseorang yang pengeluaran perkapita per bulannya dibawah garis kemiskinan yang disetarakan dengan 2.100 kalori / hari. Pada tahun 2001 nilai garis kemiskinan berada pada Rp. 75.642,- sedangkan pada tahun 2003 menjadi Rp. 109.833,-. Berdasarkan kriteria di atas, pada tahun 2001 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat mencapai 31,36 %, pada tahun 2002 angka tersebut menurun 31,04 %. Pada tahun 2003 angka persentase penduduk miskin meningkat menjadi 33,49 %, tahun 2004 menjadi 32,75 % dan melalui pendataan BPS pada akhir tahun 2005 angka kemiskinan menjadi 54,16 % (ditetapkan sebagai jumlah KK penerima BLT).

3. Pemberdayaan perempuan pada beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dengan aktifnya keterlibatan berbagai unsur baik pemerintah, LSM, Yayasan keagamaan dan para politisi didalam melakukan kampanye pengarusutamaan gender. Namun demikian kualitas hidup kaum perempuan dan anak-anak masih relatif rendah yang ditandai dengan tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
4. Salah satu kekayaan budaya Lombok Barat adalah kesenian berupa tari-tarian, ukiran, kerajinan (hand made) dan musik tradisional yang selama ini menjadi modal dari sektor pariwisata. Namun demikian, sejauh ini aset budaya tersebut belum secara optimal dikembangkan sebagai suatu industri yang mampu mengangkat perekonomian daerah maupun kesejahteraan para pelakunya.
5. Dibidang kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ritual ibadah telah berkembang di Lombok Barat sebagai daerah yang religius, sebagaimana sebutan populer bagi pulau seribu masjid. Begitu pula dengan keharmonisan antar umat beragama masih tetap terjaga dan terjalin dengan penuh toleransi. Namun demikian permasalahan kehidupan justru terjadi di dalam kehidupan intern seperti berkembangnya aliran yang dianggap sesat / menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya dan hal ini sering menimbulkan konflik sosial dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

B. EKONOMI

1. PDRB Kabupaten Lombok Barat tahun 2002 adalah sebesar Rp. 1.640.658.790.000,- Atas Dasar Harga Konstan. Apabila dibandingkan dengan PDRB pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.582.347,- Atas Dasar Harga Koinstan, maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan Ekonomi riil Atas Dasar Harga Konstan antara tahun 2001-2002 sebesar 3,62 %. Selanjutnya pada tahun 2001 hingga 2004 pertumbuhan ekonomi berangsur - angsur terus membaik yakni 3,31 %; 3,62 %; 4,36 % dan 5,58 %. Kondisi pada tahun 2001 menunjukkan peningkatan disebabkan kondisi pariwisata mulai membaik pasca tragedi 171, dengan meningkatnya jumlah arus wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat. Pada tahun 2002, dimana kondisi pariwisata memburuk sebagai dampak penurunan

2.1. KONDISI SAAT INI

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat selama ini telah menunjukkan keberhasilan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan agama, ekonomi, pemerintah daerah, politik, sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, kamtibmas dan bidang lainnya. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum mampu diselesaikan dalam waktu dekat dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

A. SOSIAL BUDAYA DAN KEAGAMAAN

1. Di bidang sosial dan budaya, pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan berbagai kemajuan dan perkembangan seperti dipahaminya keragaman, perbedaan pendapat dan bagaimana mengatasi konflik di masyarakat melalui musyawarah dan bukan dengan kekerasan. Gangguan keamanan secara umum masih dalam tingkat terkendali, meskipun demikian terdapat perkembangan variasi kejahatan, upaya perusakan lingkungan dan aktualisasi konflik antar kelompok masyarakat yang terkait dengan SARA. Berbagai gangguan keamanan di wilayah Lombok Barat tersebut yang belum dapat diimbangi dengan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan.
2. Di dalam perwujudan pelestarian budaya lokal, sejauh ini telah dikembangkan model pembangunan partisipatif yang mengutamakan penyelesaian masalah dan tantangan pembangunan melalui aset dan potensi masyarakat setempat. Wujudnya antara lain awig – awig, gerakan jum'at bersih, OM TRIPAT, Pade Periri Desa dan lain sebagainya, namun demikian upaya untuk mengakomodir karakteristik lokal tersebut belum optimal karena cepatnya perkembangan informasi global dan kuatnya dominasi kebijakan / program nasional.

4. **Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan**, yaitu dengan meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan, meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan dan sumberdaya alam yang tidak terbarukan seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi, mengembangkan potensi sumber daya kelautan, mewujudkan konservasi sumber daya air, menjamin terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam hayati, mengembangkan model pembangunan berbasis beresiko bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.

5. **Mewujudkan Masyarakat Yang Religius**, yaitu memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terciptanya masyarakat yang mengerti dan sadar akan aturan hukum, terjalannya kerukunan internal dan antar umat beragama, diterapkannya nilai-nilai agama dalam rangka memantapkan landasan moral dan etika pembangunan daerah.

Mandiri : Perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera, mampu sejajar dengan daerah lain mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Religius : Perwujudan keadaan masyarakat yang sejahtera, mandiri, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, menerapkan nilai-nilai agama dalam rangka memantapkan landasan moral.

3.2. MISI

Dalam mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera**, yaitu meningkatkan pembangunan di daerah dengan terjaminnya ketersediaan pangan dan gizi masyarakat, memenuhi kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat, menyediakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan kualitas penduduk, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan**, yaitu meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah Kecamatan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, mengurangi persentase penduduk miskin, menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia menatap peran pemerintah dan masyarakat, mewujudkan kerjasama antar daerah, meningkatkan peranan informasi dan komunikasi, menyediakan pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.
3. **Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Berdaya Saing**, yaitu meningkatnya kemampuan dan kekuatan masyarakat yang tercermin dengan ketersediaan SDM yang berkualitas, meningkatnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing, meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu dan teknologi.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) memerlukan suatu filosofi yang mampu menjadi pedoman dalam menentukan Visi dan Misi serta arah pembangunan daerah.

Filosofi pembangunan yang berakar di Kabupaten Lombok Barat yaitu PATUT, PATUH PATJU dengan pengertian sebagai berikut :

PATUT : Baik, terpuji, layak, wajar tidak berlebihan

PATUH : Rukun, damai, toleransi, saling harga menghargai

PATJU : Rajin, giat tak mengenal putus asa

Filosofi tersebut diatas merupakan totalitas nilai yang mengandung pesan agar setiap penduduk dan pemimpin haruslah bertindak menurut hukum, bijaksana, berbudi pekerti luhur, tidak berlebih-lebihan, rukun, saling harga menghargai, kerjasama dalam hal yang baik-baik, serta giat tak kenal putus asa dalam menjalankan kewajiban, demi pembangunan daerah dan agama. Berdasarkan filosofi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tersebut di ambil kesepakatan bersama bahwa selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dapat di tetapkan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat.

3.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat 2005-2025 menetapkan Visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu "**Lombok Barat Sejahtera Mandiri dan Religius**".

Sejahtera : Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, karena terpenuhinya kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

E. RPJM ke-4 (2020-2024)

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Lombok Barat yang Sejahtera, Mandiri dan Religius. Melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, pemerataan pembangunan di berbagai wilayah mandiri dan berdaya saing didukung oleh SDM yang berkualitas. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan berkembangnya lembaga ekonomi mikro yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya kemampuan iptek, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesejahteraan dan perlindungan anak dan kesetaraan gender, mempertahankan pertumbuhan penduduk yang seimbang, sumber daya manusia yang berkarakter cerdas tangguh kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan perilaku masyarakat Lombok Barat yang religius toleran terhadap keberagaman dan berorientasi Iptek.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup semakin mantap yang diwujudkan dengan kemampuan masyarakat berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur perekonomian semakin meningkat berdaya saing dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam dan sektor jasa.

Didalam bidang pendidikan diharapkan semakin maju sehingga mampu mendorong perekonomian yang efisien dan produktifitas yang tinggi serta berkembangnya usaha dan investasi.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus dipertahankan baik nilai tambah, daya saing serta meningkatnya modal pembangunan Kabupaten Lombok Barat pada masa yang akan datang.

agribisnis dan perbaikan sub sistim agribisnis, revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, relokasi sumberdaya, pendanaan dan wilayah pertumbuhan agribisnis.

Pengembangan perindustrian diarahkan pada pengembangan industri rakyat berorientasi ekspor, sedangkan penguatan perdagangan ditekankan pada penguasaan pasar regional dan nasional dan seiring dengan selesainya pembangunan bandara Internasional Lombok Tengah maka dapat dibuka akses internasional yang lebih besar.

Meningkatnya penegakan hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat luas akan memberikan iklim investasi yang kondusif baik di bidang pariwisata maupun bidang-bidang lainnya sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha yang lebih luas.

Semakin baiknya daya dukung lingkungan sebagai salah satu indikasi keberhasilan daripada pengendalian penduduk dan semakin serasinya pemanfaatan ruang yang konsisten akan memberikan arah bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat. Di sisi lain, upaya pelestarian dan rehabilitasi sumberdaya alam yang terbarukan seperti hutan, lahan pertanian dan perikanan semakin intensif. Hal tersebut akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pemantapan sarana prasarana publik yang berorientasi pada pelayanan investasi. Selain itu juga diupayakan kemitraan dengan pihak swasta untuk penyediaan jaringan komunikasi dan informasi, transportasi darat dan laut, penyediaan energi listrik dan penyediaan air minum bagi masyarakat.

Di dalam perwujudan sistim pemerintahan yang baik, akan diarahkan pengembangan sistim birokrasi yang lebih kompetitif dengan didukung birokrasi yang menerapkan merit system. Pola perencanaan partisipasif yang telah dijalankan dengan baik akan mempercepat pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan di masyarakat, sehingga disparitas antar wilayah maupun pelaku pembangunan sedapat mungkin diminimalisir.

dengan mengembangkan pola-pola kemitraan Pemda dengan sektor swasta dan perbankan, memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan andalan. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin terus diupayakan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminatif.

Seiring dengan membaiknya iklim demokrasi, tatanan masyarakat ditandai dengan meningkatnya keadilan dan penegakan hukum, meningkatnya indeks kesetaraan gender, kinerja pelayanan publik semakin baik dengan membaiknya sistem desentralisasi.

Dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, perlu terus didukung dengan peningkatan kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang.

C. RPJM ke 3 (2015 – 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke 2, RPJM ke 3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan menengah dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Kualitas sumberdaya manusia terus membaik ditandai dengan meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pendidikan yang efisien dan efektif. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga membaik dengan meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya agro industri, kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pertanian diarahkan pada penataan

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke 1, RPJM ke 2 diarahkan untuk menyediakan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dengan melanjutkan upaya peningkatan produksi komoditas-komoditas unggulan yang mampu mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) melalui kemampuan berdaya saing.

Pembangunan pertanian akan lebih mengarah pada penumbuhan agroindustri berskala menengah melalui kemitraan antara petani dan sektor swasta. Juga untuk lebih memantapkan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat telah membaik seiring dengan keterjangkauan masyarakat terhadap sarana prasarana kesehatan dasar di seluruh wilayah Lombok Barat, untuk itu pembangunan akan diarahkan pada mutu pelayanan dan dukungan jaminan pemeliharaan kesehatan secara swadaya melalui kesadaran masyarakat. Selain itu, pembangunan akan diarahkan pada peningkatan sarana prasarana pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah serta kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pelayanan kesehatan.

Upaya meningkatkan derajat pendidikan masyarakat akan diarahkan pada sistem pendidikan yang kompetitif dengan didukung mutu tenaga pendidikan. Ketersediaan sekolah lanjutan dan kejuruan akan ditingkatkan dan dapat dipenuhi ke semua wilayah kecamatan agar mudah dijangkau masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan telah mampu membebaskan biaya pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh masyarakat.

Upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dilakukan dengan mengembangkan dan menata regulasi sistem perlindungan dan jaminan sosial yang memadai dengan didukung sistem data elektronik kependudukan yang berjalan dengan baik. Berbagai fasilitas sosial telah dapat disediakan pemerintah daerah untuk masyarakat umum. Kondisi ini akan sinergis dengan berkembangnya civil society di masyarakat Lombok Barat yang berorientasi terhadap kultur yang religius dan mengedepankan nilai-nilai moral dan budaya lokal.

Kondisi perekonomian yang menunjukkan perbaikan diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita maupun daya beli masyarakat terus ditingkatkan

Dibidang pelayanan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan akses serta revitalisasi sarana dan prasana pendidikan dari mulai Pra Sekolah sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Selain itu pendidikan akan diarahkan pada pemenuhan Life Skills untuk memberikan bekal di masa depan.

Di bidang kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan akses serta derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan Puskesmas/Pustu/Pusling serta Pelayanan RSUD Patut Patuh Patju. Untuk itu akan diupayakan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas serta RSUD, termasuk upaya merubah perilaku masyarakat dan kemandirian masyarakat di dalam menjaga kesehatannya.

Dibidang kesejahteraan sosial akan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Untuk lebih meningkatkan pemerataan kesempatan dalam pembangunan dan hasil pembangunan akan diupayakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat desa dan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal akan diarahkan pada pengembangan komoditi unggulan serta meningkatkan peran lembaga keuangan mikro di pedesaan. Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah akan ditandai dengan tersedianya sarana prasarana aparatur serta meningkatnya SDM aparatur yang mengarah pada kompetensi dan profesionalitas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat seiring dengan berkurangnya persentase keluarga (KK) miskin, berkurangnya penduduk yang buta huruf, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak sehingga dapat sejajar dengan daerah-daerah lainnya.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Lombok Barat ditandai dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, membaiknya pengelolaan sumberdaya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi ini dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi.

B. RPJMD ke-2 (2010-2014)

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta bentuk-bentuk perilaku merasa memiliki "daerahnya" dan taat hukum.
 - b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan, pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan keputusan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud diatas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Lombok Barat 2005 – 2025.

Setiap sasaran pokok dalam 6 (enam) misi, pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing masing tahapan. Prioritas pada masing masing misi dapat dipersempit sebagai prioritas utama lima tahunan, yang akan diuraikan sebagai berikut

A. RPJMD ke-1 (2005-2009)

Berlandaskan pada hasil pelaksanaan pembangunan sebelumnya, RPJM ke-1 diarahkan untuk menyediakan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat melalui upaya peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura melalui pola agrobisnis yang bertumpu pada keberdayaan petani. Penguatan lembaga-lembaga ketahanan pangan lokal di masyarakat pedesaan. Peningkatan kualitas penduduk diprioritaskan untuk mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk guna membentuk keluarga kecil yang berkualitas. Untuk menyediakan lapangan kerja yang layak, akan diupayakan peluang dan kemudahan bagi investasi melalui penyederhanaan prosedur dan perijinan.

1. Terwujudnya masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi berdasarkan nilai-nilai agama, diarahkan untuk :

- a. Memantapkan fungsi dan peranan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan dan pembangunan.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat.
- c. Meningkatkan peranan tuan guru dan alim ulama dalam pembinaan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

2. Memantapkan kerukunan inter dan antar umat beragama, diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik seperti religius, kebersamaan, dan persatuan melalui transformasi, revitalisasi, dan aktualisasi tata nilai budaya daerah yang unggul.
- b. Mengembangkan bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas melalui kesenian dalam rangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.
- c. Mengembangkan budaya IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEK dan budaya produktif.

3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memantapkan keamanan masyarakat melalui mekanisme pemolisian masyarakat, yaitu masyarakat turut bertanggungjawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
- c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan profesionalisme pamswakarsa melalui penataan organisasi dan fungsi pamswakarsa, termasuk penyempurnaan seleksi, pendidikan dan latihan.

- 5. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam hayati, diarahkan untuk :**
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 - b. Memberdayakan institusi sosial dan ekonomi ditingkat lokal.

- 6. Mengembangkan modal pembangunan berbasis resiko bencana, diarahkan untuk :**
 - a. Mengembangkan sistem deteksi dini , sosialisasi dan deseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam pada masyarakat.
 - b. Meningkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi.

- 7. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan , diarahkan untuk :**
 - a. Memanfaatkan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.
 - b. Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.

- 8. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk :**
 - a. Meningkatkan dukungan kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perluasan penerapan etika lingkungan .
 - b. Menegakkan hukum lingkungan yang adil dan tegas.
 - c. Meningkatkan dukungan sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik.

- 9. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup , diarahkan untuk :**
 - a. Meningkatkan kesadaran generasi muda yang peduli terhadap isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 - b. Mempersiapkan penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Mewujudkan masyarakat yang religius, bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum

- a. Mengelola secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama sumberdaya alam terbarukan dalam kondisi baik.
 - b. Merehabilitasi dan memulihkan daya dukung terhadap sumberdaya alam terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
- 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi, diarahkan untuk :**
- a. Menghasilkan nilai tambah yang optimal, output diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital komulatif.
Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan kepada sektor-sektor lain yang produktif.
 - b. Mengembangkan reklamasi, dan konservasi pada area pertambangan.
 - c. Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikro hidro, energi matahari, arus laut dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
- 3. Mengembangkan potensi sumberdaya kelautan, diarahkan untuk :**
- a. Meningkatkan pemanfaatannya melalui pendekatan multi sektor integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
 - b. Menjamin kelanjutan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengelolaan yang terpadu antar sektor lautan dan daratan.
- 4. Mewujudkan konservasi sumberdaya air, diarahkan untuk :**
- a. Menjamin kelanjutan daya dukung sumberdaya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkap air dan keberadaan air tanah.
 - b. Mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pendekatan demand management yang ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas dan kendala pasokan air.
 - c. Memperkokoh sumber kelembagaan sumberdaya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

- h. Mendorong investasi untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
 - i. Meningkatkan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas (Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan) Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan dalam kaitannya dengan mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan ketahanan pangan.
 - j. Mewujudkan industri yang berdaya saing dengan basis keunggulan komperatif.
 - k. Mendorong berkembangnya industri jasa, termasuk jasa imfrastruktur dan keuangan.
 - l. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan komoditas ekspor daerah.
 - m. Menjamin ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah dalam harga yang terjangkau.
 - n. Mengembangkan kepariwisataan agar mampu meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan perluasan kesempatan kerja.
 - o. Memperbaiki pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel, dan dapat menjamin efektifitas pemanfaatan.
 - p. Meningkatkan efektifitas Penerimaan Asli Daerah.
- 3. Meningkatkan Penguasaan, Pemamfaatan dan Penciptaan IPTEK, diarahkan untuk :**
- a. Mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - b. Mengembangkan SDM IPTEK, meningkatkan anggaran Riset, meningkatkan sarana dan prasarana IPTEK.

D. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

- 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang terbarukan, seperti Hutan, Pertanian, Perikanan dan Perairan, diarahkan untuk :**

- d. Menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh lingkungan informasi yang ada di wilayah kecamatan.

C. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, diarahkan untuk :

- a. Memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.
- c. Memberdayakan perempuan dan anak melalui peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
- d. Peningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
- e. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah, diarahkan untuk :

- a. Memperkuat basis keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi.
- b. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antara pusat-pusat pengembangan ekonomi.
- c. Mengembangkan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan tercapainya penanggulangan kemiskinan.
- d. Mengembangkan kelembagaan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik.
- e. Mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
- f. Mengembangkan koperasi dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil Menengah.
- g. Memperkuat struktur perekonomian daerah agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

5. Mengembangkan Kapasitas Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan termasuk upaya peningkatan kemitraan masyarakat dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
- b. Penguatan lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD).
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA, pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasinya dan peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif.

6. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan profesional diarahkan untuk :

- a. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur yang baik pada semua lini pemerintahan dan pada semua kegiatan.
- b. Memberikan sanksi yang seberat-beratnya pada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- d. Meningkatkan etika birokrasi budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintah terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

7. Meningkatkan pranala komunikasi dan informasi, diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.
- b. Mewujudkan pemerataan informasi dengan mendorong munculnya media-media masa daerah yang independen.
- c. Menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat intraktif antara masyarakat dengan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

- d. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah kabupaten dengan wilayah pedesaan.
- e. Mendorong pembangunan pedesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, dan pengembangan sosial kapita dan human kapita.
- f. Memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.
- g. Mengelola pertanahan secara efisien, efektif serta melaksanakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi.

2. Mengurangi Kemiskinan Dalam Masyarakat, diarahkan untuk :

- a. Melindungi dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara proporsional.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar masyarakat miskin.

3. Meningkatkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia, diarahkan untuk :

- a. Mengatur permasalahan berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha, dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya.
- b. Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum.
- c. Menghilangkan kemukiman terjadinya tindak pidana korupsi serta menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang berkaitan dengan KKN.

4. Menata peran pemerintahan dan masyarakat diarahkan untuk :

- a. Pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat di bidang ekonomi dan pendidikan.
- b. Menata fungsi-fungsi, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat.

- b. Menyediakan jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang bermutu dan terjangkau yang disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- c. Meningkatkan harkat dan kualitas manusia.
- d. Menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia.
- e. Meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas penduduk.
- f. Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan, diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan perilaku dan kemandirian masyarakat.
- c. Melakukan upaya-upaya promotif dan preventif.

7. Meningkatkan kesejahteraan sosial, diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Menyediakan sarana pelayanan sosial yang memadai.
- c. Meningkatkan kualitas SDM kesejahteraan sosial.
- d. Mengembangkan, menata dan menyusun sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.
- e. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

B. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Dan Berkeadilan

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan, diarahkan untuk :

- a. Mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan ketertinggal disekitarnya.
- b. Mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil melalui pemberdayaan masyarakat secara langsung dan jaminan pelayanan publik.
- c. Mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga desa.

- b. Memperkuat kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun mutu gizinya, aman, dan terjangkau.
 - c. Mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- 2. Meningkatkan kualitas penduduk diarahkan untuk :**
- a. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.
 - b. Memperbaiki persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - c. Menata sistem administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3. Menyediakan lapangan kerja, diarahkan untuk :**
- a. Mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja disektor informal.
 - b. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.
 - c. Meningkatkan produktifitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah tinggi.
- 4. Menyediakan kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak, diarahkan untuk :**
- a. Menyelenggarakan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas.
 - b. Membangkitkan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat.
- 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, diarahkan untuk :**
- a. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

7. Terwujudnya keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.
8. Tersedianya infrastruktur moderen yang tersebar di seluruh wilayah Lombok Barat.

C. Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, ditunjukkan oleh :

1. Kualitas SDM yang makin meningkat.
2. Meningkatnya perekonomian daerah seperti komoditi pertanian, industri dan jasa lainnya.
3. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
4. Tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai.

D. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, ditunjukkan oleh :

1. Meningkatnya kualitas pendayagunaan sumber daya alam seperti hutan, lahan pertanian dan perkebunan, dan perairan.
2. Terkendalinya pemafaatan dan pengelolaan sumber daya pertambangan dan mineral serta energi.
3. Peningkatan pengembangan sumber daya kelautan.
4. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas perekonomian.
5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup.

E. Terwujudnya masyarakat yang religius, di tunjukan oleh :

1. Terwujudnya masyarakat yang bermoral tinggi berdasarkan nilai-nilai agama
2. Terjalannya kerukunan inter dan antar umat beragama
3. Terciptanya masyarakat yang sadar aturan hukum

Untuk mewujudkan kesejahteraan kemandiri serta masyarakat yang religius yang di inginkan arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 (Dua puluh) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

A. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

1. Menjamin ketersediaan pangan dan gizi masyarakat, diarahkan untuk :

- a. Menjaga ketahanan dan kemandirin pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah.

**ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN INDIKATOR
KEBERHASILAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2005-2025**

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Lombok Barat sejahtera, mandiri dan religius dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana cita-cita otonomi daerah dalam UUD 32 tahun 2004.

Sebagai ukuran tercapainya Lombok Barat sejahtera, mandiri dan religius, pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

A. Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Sejahtera, ditunjukkan oleh :

1. Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas penduduk.
3. Tersedianya lapangan kerja yang layak.
4. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana publik.
6. Meningkatnya pelayanan dasar pendidikan.
7. Meningkatnya pelayanan kesehatan.
8. Meningkatnya kesejahteraan sosial.

B. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan, ditunjukkan oleh :

1. Tingkat pembangunan yang semakin merata diseluruh wilayah kecamatan.
2. Berkurangnya angka persentase keluarga miskin.
3. Tersedianya pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah.
4. Tersedianya sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang bermutu di seluruh wilayah Lombok Barat.
5. Mantapnya sistem hukum dan penegakan hak azasi manusia.
6. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan partisipatif.

Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Lombok Barat, merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat ini juga menjadi arah pedoman di dalam penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan visi LOMBOK BARAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN RELIGIUS, perlu didukung oleh : (1) Komitmen dari kepemimpinan Daerah yang kuat dan demokratis; (2) Konsisten Kebijakan pemerintah; (3) Keberpihakan pada masyarakat; dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.